



PENGUSAHA MALIOBORO WADUL PEMKOT YOGYA

Keluhkan Semi Pedestrian Hingga PKL Depan Toko



UMBULHARJO (MERAPI) - Perkumpulan Pengusaha Malioboro Ahmad Yani (PPMAY) mendatangi Pemkot Yogyakarta terkait penerapan semi pedestrian. Mereka menilai infrastruktur di Malioboro belum siap untuk mendukung konsep semi maupun full pedestrian. Dampaknya mulai dari sulitnya akses keluar masuk warga sekitar hingga klaim toko yang sepi.

"Pedestrian, infrastruktur belum siap. Karena saat dilakukan uji coba terjadi kemacetan seperti di Jalan KHA Dahlan dan lainnya. Jadi belum ideal. Apalagi jika semi pedestrian diberlakukan setiap hari," kata Pembina PPMAY Sadana Mulyono, saat melakukan audiensi di Balai Kota Yoga, Selasa (17/12).

Dia mengakui akses warga sekitar Malioboro untuk keluar masuk juga sulit. Dicontohkan adanya warga yang tidak bisa masuk ke Malioboro meskipun kendaraan bermotor dituntun atau tidak dikendarai.

**Bersambung ke halaman 9*

MERAPI-TRI DARMAYATI

Sejumlah pengusaha dari PPMAY saat menyampaikan masukan dan keluhan terkait kondisi Malioboro dan penerapan semi pedestrian.

Keluhkan

Selain itu pengusaha di Malioboro mengeluhkan kondisi toko-toko yang sepi saat diterapkan semi pedestrian. Termasuk andong dan becak yang dinilai parkir sembarangan menambah macet.

"Kami mendukung asal dari pemerintah mempersiapkan infrastruktur, sehingga pengendara nyaman dan pengusaha juga diuntungkan. Infrastruktur seperti parkir yang memadai. Bayangkan jika ada yang hendak belanja di toko selatan namun parkirnya di Abu Bakar Ali, kasihan harus jalan jauh," terangnya.

Dalam kesempatan itu pihaknya juga mempertanyakan terkait keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang di depan toko akan dipertahan atau tidak. Pengusaha lainnya juga mengeluhkan terkait penempatan angklung yang dinilai polusi suara meng-

ganggu saat komunikasi dengan konsumen toko.

"Kami nggak ingin Selasa Wage (semi pedestrian) jadi momok bagi warga sekitar. Mau mengantar kontrol periksa kesehatan orangtua aksesnya susah. Mohon ada kebijakan khusus bagi warga sekitar. Kalau pakai KTP, ada penghuni di Malioboro yang bukan KTP sekitar. Solusinya perlu ada kartu khusus," papar Yulianto, pengusaha Malioboro lainnya.

Menanggapi hal itu, Wakil Walikota Yogyakarta Heroe Poerwadi mengatakan pemkot terbuka terhadap masukan dari PPMAY dan akan dibahas lebih lanjut terkait hal teknis. Misalnya terkait kartu bagi penghuni warga sekitar Malioboro. Termasuk kasus khusus jika penghuni dalam kondisi gangguan kesehatan, lanjutnya, tentu akan diberikan akses.

"Hal-hal teknis kami bicarakan lagi bareng-bareng

Instansi	Nilai Berita
1.	<input type="checkbox"/> Negatif
2.	<input type="checkbox"/> Positif
3.	<input type="checkbox"/> Netral
4.	
5.	

pengusaha. Kami ingin menata Malioboro agar semua bisa menikmati. Kami juga ingin agar wisatawan juga membeli oleh-oleh di Malioboro," urai Heroe didampingi jajaran instansi terkait.

Terkait PKL, Heroe menyatakan akan menata keberadaan PKL di sisi barat yang menempel di toko. Para PKL yang tergabung dalam paguyuban Pemalni, akan digeser membelakangi PKL paguyuban Tri Dharma.

Sementara itu Sekda Pemkot Yogyakarta Aman Yuridijaya menuturkan dari masukan dan keluhan PPMAY, pihaknya penanganan akan mengedepankan skala prioritas dan mencari titik keseimbangan semua pihak. Dia meminta perwakilan paguyuban untuk membicarakan masalah tersebut lebih lanjut.

(Tri)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. UPT. Malioboro	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 21 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005